

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dicky Aulia Rochman dan Ilmi Usrotin (2024), persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji peran pemerintah desa dalam mendorong keberhasilan program berbasis digital. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat dinamika di tingkat desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rochman dan Usrotin lebih menitikberatkan pada konsep desa pintar secara umum dengan indikator smart government, smart community, dan smart environment. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Program 1 Desa 1 Wi-Fi serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih sempit namun mendalam, yaitu pada hubungan antara implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam konteks program Wi-Fi desa.

Pada penelitian Rindi Astika Yuliana dan Natalia (2025), persamaannya terletak pada pembahasan mengenai digitalisasi desa serta tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti transformasi digital secara luas, termasuk dampaknya terhadap UMKM dan pariwisata desa. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap satu program spesifik. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat benar-

benar memanfaatkan fasilitas Wi-Fi, bukan hanya melihat dampak digitalisasi secara umum.

Selanjutnya, penelitian Cancan Firman Wilantika dan Yulikuspartono (2024) memiliki persamaan dalam hal pembahasan akses internet di desa terpencil. Namun, penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek teknis, yaitu penerapan teknologi mesh Wi-Fi untuk meningkatkan jangkauan jaringan. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada aspek teknis jaringan, melainkan pada aspek sosial, yaitu partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari teknologi ke perilaku dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Pada penelitian Helmi Nurseha dkk. (2022), persamaannya adalah sama-sama membahas perencanaan dan pengembangan jaringan Wi-Fi untuk mendukung desa digital. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menekankan pada perencanaan teknis jaringan dan kebutuhan infrastruktur seperti jumlah access point. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebaruan penelitian ini adalah mengaitkan aspek implementasi kebijakan dengan tingkat partisipasi masyarakat, bukan hanya pada perencanaan jaringan.

Penelitian Rosdiyani (2020) memiliki persamaan dalam hal pembahasan pemasangan jaringan Wi-Fi di desa serta manfaatnya bagi komunikasi dan pembelajaran. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada

proses pemasangan jaringan dan dampak umum yang dihasilkan. Perbedaannya, penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji tidak hanya keberadaan jaringan, tetapi juga sejauh mana masyarakat terlibat dan memanfaatkannya secara aktif.

Pada penelitian Dona Novitasari (2023), persamaannya terletak pada pembahasan implementasi program internet desa serta peran lembaga seperti BUMDes. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek penyediaan layanan dan sosialisasi program. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya melihat peran lembaga, tetapi juga mengkaji respon dan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Kebaruan penelitian ini adalah mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam satu kerangka kajian.

Selanjutnya, penelitian Diah Ayu Retnani Wulandari dkk. (2023) memiliki persamaan dalam hal pembahasan peningkatan layanan internet desa dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kualitas jaringan (QoS) dan peningkatan layanan teknis. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada aspek sosial dan partisipatif masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut. Kebaruan penelitian ini adalah melihat keberhasilan program tidak hanya dari kualitas jaringan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat.

Pada penelitian Akhmad Qashlim dkk. (2021) memiliki persamaan dalam hal pembahasan literasi digital dan upaya meningkatkan pemanfaatan

internet di desa. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebagai upaya peningkatan literasi digital. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas karena tidak hanya melihat pelatihan, tetapi juga keseluruhan proses implementasi program dan tingkat partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara implementasi kebijakan, kesenjangan digital, dan partisipasi masyarakat dalam satu konteks program yang spesifik.

Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan lebih komprehensif karena tidak hanya menyoroti aspek teknis atau dampak umum digitalisasi desa, tetapi juga mengkaji secara mendalam keterkaitan antara implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Program 1 Desa 1 Wi-Fi.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Temuan	Relevansi
1	Dicky Aulia Rochman & Ilmi Usrotin (Rochman & Choiriyah, 2024)	2024	Dampak Tata Kelola Lokal Terhadap Pengembangan Desa Pintar di Indonesia	Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisor dalam pengembangan desa pintar dengan indikator smart government, smart community, dan smart environment; implementasi smart	Relevan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan kualitatif seperti wawancara, yang dapat mengungkap dinamika kolaboratif di Desa Warukin

				government dan smart community telah berjalan baik, namun smart environment masih belum optimal.	untuk meningkatkan efektivitas program wifi.
2	Rindi Astika Yuliana & Natalia	2025	Transformasi Digital Desa Pongkok: Tantangan dan Potensi Menuju Desa Pintar yang Berkelanjutan	Digitalisasi meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui sistem informasi digital, mendorong UMKM melalui media sosial dan e-commerce, serta mempromosikan pariwisata; tantangan utama adalah infrastruktur internet terbatas dan rendahnya literasi digital.	Relevan untuk mengeksplorasi tantangan partisipasi masyarakat di daerah terpencil seperti Desa Warukin melalui metode kualitatif, seperti studi kasus, untuk memahami hambatan literasi digital dan potensi pemberdayaan ekonomi via wifi.
3	Cancan Firman Wilantika & Yulikuspartono	2024	Penerapan Mesh Wi-Fi System untuk Akses Internet di Desa Terpencil Kabupaten Lebak	Teknologi Mesh Wi-Fi berhasil meningkatkan akses internet di daerah terpencil dengan jangkauan yang stabil dan merata, membuka peluang ekonomi dan pendidikan; implementasi dilakukan melalui survei, uji coba, dan	Relevan untuk membandingkan implementasi teknologi wifi di Desa Warukin, menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan akses stabil untuk kegiatan ekonomi dan pendidikan.

				analisis kualitatif.	
4	Helmi Nurseha, Anggun Fitriani Isnawati & Achmad Rizal Danisya	2022	Analisis Perencanaan Jaringan Wi-Fi Untuk Mendukung Konsep Desa Digital di Wilayah Kota Tasikmalaya	Perencanaan berdasarkan kapasitas lebih baik daripada cakupan, dengan 10 access point (AP) dibutuhkan; simulasi menunjukkan peningkatan signal level dan throughput, serta peningkatan jumlah user yang terhubung.	Relevan untuk menilai perencanaan infrastruktur wifi di Desa Warukin melalui analisis kualitatif partisipasi masyarakat, seperti observasi penggunaan, untuk memastikan kapasitas mendukung keterlibatan warga secara optimal.
5	Rosdiyani	2020	Pemasangan Jaringan Internet Berbasis Wireless Fidelity (WIFI) Di Kampung Wangun Cipurut	Pemasangan jaringan Wi-Fi menggunakan topologi mesh meningkatkan akses internet untuk komunikasi dan pembelajaran; kegiatan melibatkan survei, perencanaan, dan evaluasi.	Relevan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan wifi untuk komunikasi dan pembelajaran di Desa Warukin, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan dan dampaknya.
6	Dona Novitasari	2023	Implementasi Program Jaringan Internet di BUMDes	Program jaringan internet dari KOMINFO melalui BUMDes menyediakan	Relevan untuk meneliti peran BUMDes dalam mendorong partisipasi masyarakat di

			Sungai Raya Dalam	akses murah dan stabil; sosialisasi manfaat internet dilakukan kepada masyarakat.	Desa Warukin melalui pendekatan kualitatif, seperti fokus group discussion, untuk memahami bagaimana sosialisasi meningkatkan pemanfaatan wifi.
7	Diah Ayu Retnani Wulandari, Albert Dewanata Mahrahillah, Muhammad 'Ariful Furqan & Benny Ridwan Sutanto	2023	Peningkatan Layanan Warga Sebagai Pendukung Tercapainya SDG's Desa Melalui Perbaikan Layanan Internet Service Desa	Perbaikan jaringan fiber optic menggunakan metode PRA meningkatkan akses internet; pengukuran QoS menunjukkan kinerja jaringan yang baik dengan throughput rata-rata 3,8, packet loss 4, dan delay 4.	Relevan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan internet yang diperbaiki di Desa Warukin, menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kontribusi terhadap SDG's melalui pengalaman warga.
8	Akhmad Qashlim, Abd Asis & Andriani	2021	Internet Masuk Desa: Sebuah Upaya Literasi Digital Untuk Menciptakan Masyarakat Melek Teknologi Pada Desa Piriang	Pemasangan antena internet dan sosialisasi literasi digital meningkatkan pengetahuan masyarakat; workshop pembuatan konten digital mendorong penggunaan internet positif.	Relevan untuk mengeksplorasi upaya literasi digital di Desa Warukin melalui penelitian kualitatif, untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui

			Kecamatan Tutar		workshop dan sosialisasi.
--	--	--	--------------------	--	------------------------------

Sumber: Peneliti 2025

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diklasifikasikan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi pedesaan seperti 1 Desa 1 *Wi-Fi* umumnya rendah (berkisar 35-60%) dan dipengaruhi oleh hambatan multidimensi, termasuk pendidikan rendah, kurangnya kesadaran teknologi, faktor ekonomi (seperti biaya akses), dan aspek sosial-budaya (seperti peran pemimpin desa dan kampanye komunitas). Intervensi seperti pelatihan literasi digital dan pendekatan partisipatif terbukti efektif meningkatkan partisipasi, terutama di kelompok marginal. Temuan di atas mendukung penelitian ini untuk menganalisis partisipasi di Desa Warukin, dimana fenomena serupa terjadi dan menekankan perlunya strategi lokal untuk mengoptimalkan program *Wi-Fi* guna mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial.

B. Landasan Teori

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari gabungan kata “*ad*” dan “*ministrate*” yang memiliki makna “*to serve*” atau dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan memenuhi kebutuhan. (Dimmock, 1958) menjelaskan bahwa administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang juga berarti “melayani”. Dengan demikian, administrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan aktivitas pelayanan atau

pengaturan, baik dalam konteks mengelola sumber daya maupun memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

(Handy, 2023) Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan sebagai tata usaha, yaitu kegiatan yang berfokus pada pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data serta informasi. Tata usaha mencakup berbagai aktivitas seperti dokumentasi, penyusunan arsip, pengelolaan data, hingga penyajian laporan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai bagian penting dari operasional organisasi, tata usaha berfungsi untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tercatat secara akurat dan tersimpan dengan baik, sehingga mudah diakses saat dibutuhkan. Dengan tata usaha yang terstruktur, organisasi dapat menjalankan proses kerja secara efisien dan meminimalkan resiko kehilangan atau kesalahan informasi.

Lebih lanjut lagi, administrasi sebagai tata usaha memainkan peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Sistem tata usaha yang baik memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif yang tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks modern, tata usaha semakin berkembang dengan adanya teknologi digital yang mempermudah pencatatan dan pengelolaan. Organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam tata usaha mereka akan lebih siap menghadapi tantangan, menjaga kelancaran operasional, dan meningkatkan produktivitas.

Hal ini menjadikan tata usaha sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem kerja yang terorganisir dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan dalam arti luas, administrasi sering dihubungkan dengan administrasi negara atau pemerintahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Administrasi negara tidak hanya sekedar proses pengelolaan, tetapi juga melibatkan pengaturan berbagai sumber daya seperti, manusia, keuangan, dan material untuk mencapai hasil yang maksimal. Peran administrasi negara sangat penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Dengan administrasi yang baik, pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. Lebih jauh lagi, administrasi negara yang efektif dan efisien berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membutuhkan sistem administrasi yang terorganisir dengan baik agar mampu merespon kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan administrasi negara harus menjadi prioritas untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat (Zein, 2023)

b. Pengertian Publik

Kata publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang dalam bahasa Indonesia memiliki beragam makna seperti khalayak ramai, masyarakat umum, serta dapat merujuk pada negara atau pemerintahan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks tergantung pada bidang atau disiplin ilmu yang membahasnya. Dalam ranah sosial, publik mengacu pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama atau terlibat dalam suatu isu tertentu. Misalnya, dalam dunia komunikasi dan media publik merujuk pada *audience* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran informasi. Dalam konteks pemerintahan, istilah publik sering digunakan untuk menggambarkan sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelayanan negara.

Konsep ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan publik, administrasi publik, administrasi publik, hingga pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara. Keberadaan publik sebagai bagian dari suatu sistem pemerintahan menuntut adanya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai publik sangat penting baik bagi individu, organisasi, maupun pemerintah agar dapat menciptakan kebijakan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas (Marpaung, 2023).

c. Pengertian Administrasi Publik

Menurut (Keban, 2004), administrasi publik merupakan suatu proses dimana berbagai sumber daya digunakan dan dialokasikan untuk melaksanakan serta mengelola keputusan-keputusan yang terdapat dalam kebijakan publik. Dengan kata lain, administrasi publik berperan dalam menerjemahkan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah menjadi tindakan nyata yang dapat dijadikan secara efektif. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Administrasi publik juga memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Menurut (Rosenbloom, 2005) administrasi publik adalah suatu disiplin menggabungkan teori dan proses dari berbagai bidang seperti manajemen, politik, dan hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Administrasi publik bertujuan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara keseluruhan maupun dalam kelompok tertentu. Dalam praktiknya, administrasi publik tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pelaksana kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip demokrasi, hukum serta kepentingan publik.

Oleh karena itu, administrasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Administrasi publik adalah proses

pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk melaksanakan serta mengelola kebijakan publik agar dapat berjalan secara efektif. Administrasi publik berperan dalam menerjemahkan kebijakan pemerintahan menjadi tindakan nyata melalui berbagai tahapan seperti, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Selain itu, administrasi publik juga mengintegrasikan teori suatu proses dari bidang manajemen, politik dan hukum guna menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengatur serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan, administrasi publik juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan prinsip demokrasi, hukum dan kepentingan publik. Dengan demikian, administrasi publik memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Pasolong, 2016)

d. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik telah mengalami perkembangan evolusioner yang signifikan sejak awal abad ke-20. Nicholas Henry, seorang ahli terkemuka dalam bidang administrasi publik, mengidentifikasi lima paradigma utama yang menandai perkembangan disiplin ilmu administrasi publik. Setiap paradigma memiliki fokus (*locus*) dan metode (*focus*) yang berbeda, yang mencerminkan perubahan pemahaman tentang hakikat, ruang lingkup, dan pendekatan dalam administrasi publik osb

1) Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini ditandai dengan pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi. *Locus* paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, sementara *focus*-nya adalah pada metode untuk mencapai efisiensi administratif. Woodrow Wilson (1887) dan Frank Goodnow (1900) menekankan bahwa administrasi harus bebas dari intervensi politik dan berfokus pada implementasi kebijakan secara netral dan efisien (Henry, 2015; Shafritz et al., 2016).

Paradigma ini berakar pada reformasi birokrasi yang bertujuan menghilangkan korupsi dan patronase politik dalam pemerintahan. Administrasi dipandang sebagai aktivitas teknis yang dapat dipelajari secara ilmiah, terpisah secara ilmiah, terpisah dari pertimbangan politik. Namun, paradigma ini dikritik karena terlalu idealistik dan mengabaikan kenyataan bahwa administrasi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari politik (Frederickson, 1980)

2) Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1973)

Paradigma kedua berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip *universal* administrasi yang dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik publik maupun *privat*. *Locus* paradigma ini bergeser ke organisasi secara umum, sementara *focus*-nya tetap pada pencarian prinsip-prinsip administrasi yang efisien. *Luther Gulic, Lyndall Urwick dan Henry Fayol* mengembangkan konsep-konsep seperti POSDCORB

(*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) sebagai panduan manajemen (Henry, 2015).

Paradigma ini menekankan struktur organisasi yang hierarkis, spesialisasi kerja dan standarisasi prosedur. Namun, paradigma ini mulai dipertanyakan ketika Herbert Simon (1946) mengkritik bahwa “prinsip-prinsip” tersebut sebenarnya hanya merupakan “peribahasa” (*proverbs*) yang sering kontradiktif dan tidak memiliki validitas ilmiah yang kuat (Simon, 1946); (Henry, 2015)

3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebagai reaksi terhadap kritik Simon, paradigma ketiga ini mengembalikan administrasi publik ke dalam disiplin ilmu politik. *Locus* paraddigma ini adalah birokrasi pemerintahan, dengan *focus* pada ilmu politik dan kebijakan publik. Para ahli berusaha menegaskan kembali identitas administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik, dengan penekanan pada peran birokrasi dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan (Henry, 2015); (Stillman, 2010).

Paradigma ini mengakui bahwa administrator publik tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga terlibat dalam perumusan kebijakan. Konsep-konsep seperti kebijakan publik, analisis kebijakan dan studi birokrasi menjadi sentral. Namun, paradigma ini menghadapi tantangan karena dianggap terlalu normatif dan kurang memperhatikan aspek manajerial dan praktis administrasi (Shafritz, Russell, , & Borick, , 2016)

4) **Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)**

Paradigma ini muncul bersamaan dengan paradigma ketiga sebagai *respons* alternatif terhadap krisis identitas administrasi publik. *Locus* paradigma ini adalah organisasi secara umum, sementara *focus*-nya adalah pada ilmu manajemen dan teknik-teknik administratif. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik dan *privat* memiliki kesamaan fundamental dalam hal manajemen organisasi (Henry, 2015).

Pendekatan ini mengadopsi teori-teori dari ilmu manajemen, seperti teori organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Program-program pendidikan administrasi publik mulai mengintegrasikan kurikulum bisnis dan manajemen. Namun, kritik muncul bahwa paradigma ini mengabaikan karakteristik unit sektor publik, seperti akuntabilitas demokratis, kepentingan publik, dan konteks politik (Frederickson, , Smith, Larimer, & Licari, 2012).

5) **Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)**

Paradigma ini menandai upaya untuk mengembangkan identitas distinkif administrasi publik. *Locus* paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan dan organisasi publik, sementara *focus*-nya adalah pada teori organisasi publik, manajemen publik dan implementasi kebijakan dengan penekanan pada nilai-nilai publik. Paradigma ini menegaskan

bahwa administrasi publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari administrasi privat (Henry, 2015).

Paradigma ini melahirkan pendekatan *New Public Administration* yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan dan responsivitas terhadap kebutuhan warga negara (Frederickson, 1980). Selanjutnya, muncul pendekatan *New Public Management* (NPM) yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor privat untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, serta *New Public Service* yang menekankan peran administrator sebagai pelayan masyarakat dan fasilitator partisipasi warga (Denhardt & Denhardt, 2015).

6) *Governance*

Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan urusan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (*government*) tetapi juga melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, tata kelola pemerintah modern menempatkan kolaborasi antar aktor sebagai elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan partisipatif.

Paradigma *governance* juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena keterlibatan

masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, efektivitas implementasi program, serta akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan (Osborne, 2010).

Paradigma ini mengakui kompleksitas administrasi publik yang mencakup aspek politik, manajerial, legal dan etis. Konsep-konsep seperti *governance*, kolaborasi multi-sektor, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas menjadi sentral dalam paradigma ini (Osborne, 2010); (Bryson, Crosby , & Bloomberg, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, paradigma *governance* memiliki keterkaitan yang linear dengan penelitian yang berjudul “Implementasi dan Pemanfaatan Program 1 Desa 1 Wi-Fi di Desa Warukin Kabupaten Tabalong.” Paradigma ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program publik, termasuk program pembangunan berbasis teknologi informasi di tingkat desa. Melalui perspektif *governance*, program 1 Desa 1 Wi-Fi tidak hanya dipahami sebagai kebijakan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur digital, tetapi juga sebagai upaya mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses informasi, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam

pemanfaatan program tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik berbasis tata kelola partisipatif.

Program 1 Desa 1 *Wi-Fi* merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan publik (mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa) yang mencerminkan fokus paradigma kelima pada nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, akses setara dan pemberdayaan komunitas (Frederickson, 1980).

2. Kebijakan Publik

(Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut (Anderson, 2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”

1) Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa agar selaras dengan prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik desa. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2025). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Jakarta: Kementerian Desa PDPT.*

2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022

Secara umum, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital di desa, memperluas akses informasi bagi masyarakat, serta mendukung kegiatan pendidikan, ekonomi, dan

pelayanan pemerintahan desa melalui pemanfaatan jaringan internet. Program ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas internet desa untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan desa. Pemerintah Kabupaten Tabalong. (2022). Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang Program Satu Desa Satu Wi-Fi. Tabalong: Pemerintah Kabupaten Tabalong.

3. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Wijaya dan Supardo (2006) menyatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hinggis (1985) menyatakan bahwa implementasi merupakan rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Gordon (1986) menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang menentukan dalam siklus kebijakan karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2008:146-147) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

c. Teori Implementasi

1. Teori George C. Edward/Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92)

Menurut Edward III (1979), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Subarsono, 2011:90-92) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

4. Program 1 Desa 1 Wi-Fi

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 3533,42 km² yang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 121 Desa serta memiliki 10 kelurahan, Kabupaten Tabalong berada pada wilayah strategis sebagai gerbang Ibu kota Nusantara (IKN) yang mana dalam hal ini untuk percepatan dan pemerataan akses internet Pemerintah Kabupaten Tabalong Membuat sebuah Program yang bernama “1 Desa 1 Wi-Fi” Program 1 Desa 1 Wi-Fi di Tabalong merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memperluas akses internet di desa-desa sebagai bagian dari visi “*Tabalong Smart*” sebagai salah satu langkah untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik, UMKM, dan pemerataan akses digital. Seperti yang kita ketahui hingga saat ini belum semua target titik pemasangan di setiap desa sudah terpasang Wi-Fi.

Tertuang dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2025, dalam konteks penelitian mengenai implementasi dan pemanfaatan Program 1 Desa 1 Wi-Fi, peraturan ini dapat dijadikan dasar bahwa program pembangunan daerah, termasuk pengembangan infrastruktur digital dan pelayanan publik berbasis teknologi, merupakan bagian dari perencanaan strategis pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penelitian “Implementasi dan Pemanfaatan Program 1 Desa 1 Wi-Fi di Desa Warukin Kabupaten Tabalong”, regulasi ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan program pembangunan desa, termasuk pemanfaatan infrastruktur digital, harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari tata kelola pembangunan desa yang efektif.

Pemerintah kabupaten menargetkan cakupan yang lebih luas pada 2025: target awal 50 desa, dan beberapa laporan menyebut rencana perluasan hingga 61 desa ($\pm 50,4\%$ dari 121 desa) pada 2025. Pada fase awal telah dipasang Wi-Fi gratis di puluhan desa; laporan menyebutkan 14 desa sudah terpasang pada triwulan pertama pelaksanaan. Untuk lokasi titik akses, banyak desa menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat pemasangan dan wadah layanan sekitar 90% desa (109 dari 121 desa) dilaporkan telah menyiapkan lahan/RTH sebagai lokasi Wi-Fi.

Landasan teori dalam penelitian ini meliputi dan teori kesenjangan digital dan teori partisipasi masyarakat yang digunakan untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program 1 Desa 1 *Wi-Fi*.

1. Teori Kesenjangan Digital

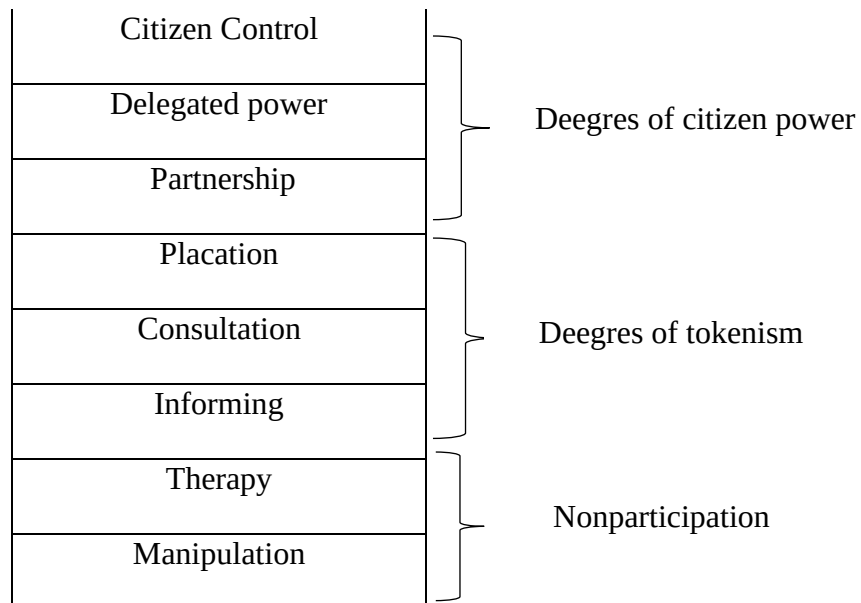
Dikembangkan oleh (Van Dijk, 2005) yang mengidentifikasi empat jenis kesenjangan digital: akses, penggunaan, keterampilan, dan dampak. Dalam konteks program 1 Desa 1 Wi-Fi, teori ini menjelaskan mengapa masyarakat pedesaan seperti di Desa Warukin mungkin mengalami kesenjangan dalam akses fisik dan keterampilan digital, yang menghambat

partisipasi penuh. Teori ini relevan untuk menganalisis hambatan struktural yang mempengaruhi pemanfaatan Wi-Fi.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Dikembangkan oleh (Arnstein S. R., 1969) melalui konsep "*Ladder of Citizen Participation*," yang menggambarkan tingkatan partisipasi dari manipulasi hingga kekuasaan warga. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam program *Wi-Fi* desa dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, yang meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa. Teori ini relevan karena membantu menganalisis apakah partisipasi di Desa Warukin mencapai tingkat yang efektif atau hanya bersifat pasif.

Arnstein mengklasifikasikan partisipasi dalam “tangga partisipasi” (*ladder of citizen participation*) yang terbagi menjadi delapan tingkatan berdasarkan distribusi kekuasaan (Arnstein S. R., 2019). Pada tingkat paling bawah adalah *manipulation* dan *therapy* yang merupakan bentuk partisipasi semu di mana masyarakat hanya dijadikan objek atau diubah persepsinya. Tingkat menengah mencakup *informing*, *consultation*, dan *placation* yang menunjukkan komunikasi satu arah, mendengarkan pendapat masyarakat tanpa jaminan implementasi, hingga masyarakat mulai memiliki pengaruh meskipun masih terbatas.

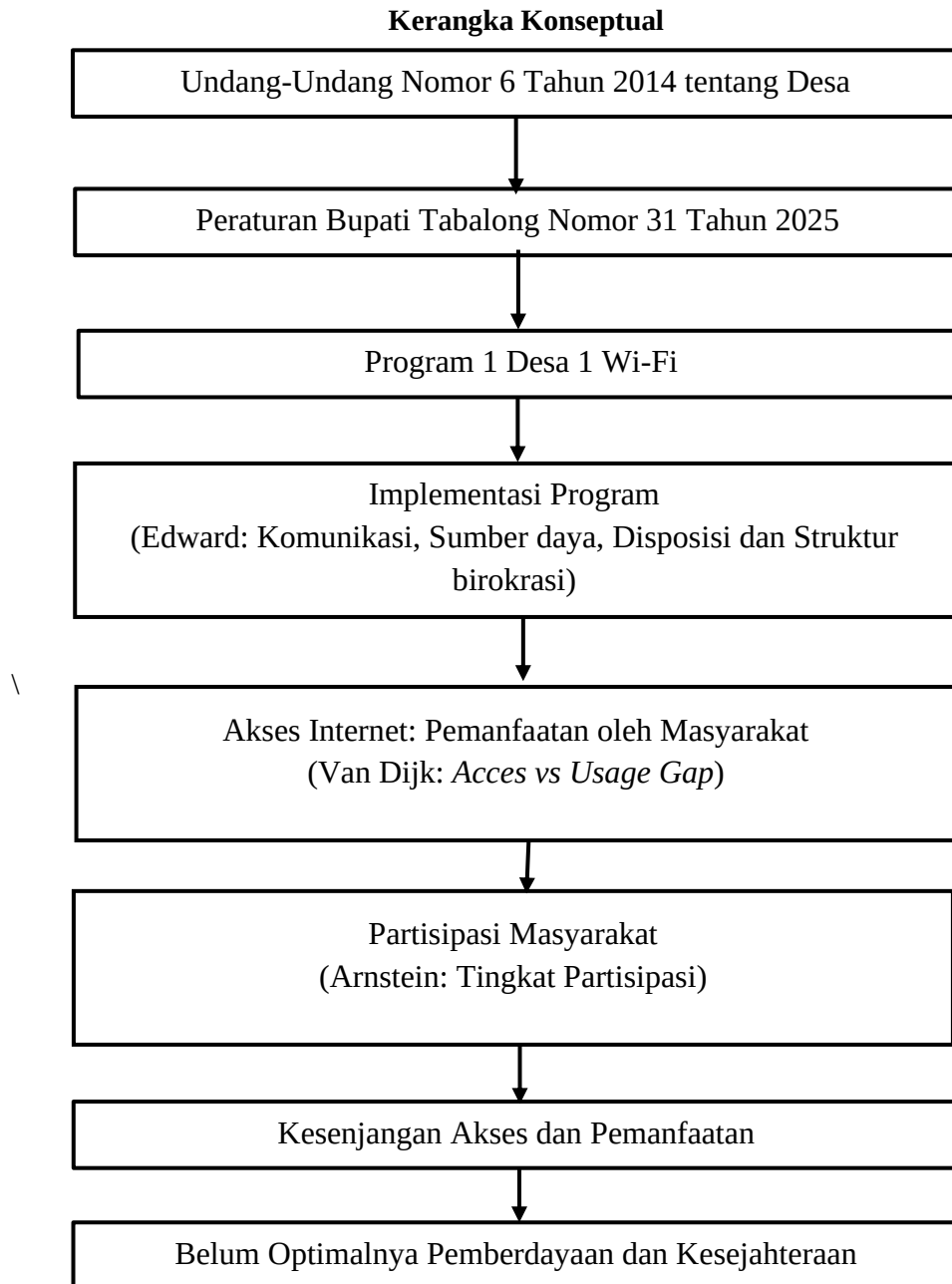


Sumber: *Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation*

Pada tingkat yang paling tinggi meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control* di mana terjadi negoisasi dan kesepakatan bersama, masyarakat memiliki kekuasaan dominan dalam pengambilan keputusan hingga masyarakat memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan program.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.2.



Sumber: Peneliti 2026